

Abstrak

Pembangunan Nasional telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun sejak Indonesia merdeka, Namun proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih mengalami masalah kesenjangan khususnya di wilayah pedesaan. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019) dinyatakan bahwa terdapat 122 kabupaten tertinggal. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah salah satu kendalanya adalah permasalahan hukum yang menghambat laju pembangunan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan hukum ini timbul karena beberapa faktor seperti ketidakstabilan sosiopolitik, perekonomian daerah, pendidiak daerah, kualitas lembaga hukum yang buruk. dan keberagaman model lingkungan di setiap daerah. Oleh karena itu, studi ini melakukan penelitian tentang faktor aspek legal dominan yang mempengaruhi proyek konstruksi di pedesaan Indonesia . Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada sejumlah kontraktor sebagai responden yang mengerjakan proyek dari Kemendes PDTT (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis multivariate yaitu metode analisi faktor yang dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji KMO (Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy), Uji Bartlett's Test Sphericity, dan uji MSA (Measures of Sampling Adequacy). Hasil dari analisi yang dilakukan menunjukan bahwa perekonomian daerah dan pemilihan pemenang lelang menjadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pembangunan daerah tertinggal.

Kata kunci: pembangunan desa tertinggal, aspek legal, Kemendes pdtt, analisis multivariate

Abstract

National development has been going on for more than 70 years since Indonesia's independence, but the development process carried out so far is still experiencing problems of inequality especially in rural areas. In the RPJMN (National Medium Term Development Plan for 2015-2019) it is stated that there are 122 underdeveloped districts. There are many obstacles faced in the regional development process, one of the obstacles is the legal problems that hinder the pace of development. Previous studies have shown that these legal problems arise because of several factors such as sociopolitical instability, regional economy, regional education, poor quality of legal institutions, and diversity of environmental models in each region. Therefore, this study conducted a study of the dominant legal aspects affecting construction projects in rural Indonesia. This research was conducted by distributing questionnaires to a number of contractors as respondents who worked on the project from the Ministry of Foreign Affairs (Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration). Data analysis was performed using multivariate analysis, namely the factor analysis method that starts from validity test, reliability test, KMO test (Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy), Bartlett's Test Sphericity test, and Measures of Sampling Adequacy test. The results of the analysis carried out show that the regional economy and the selection of auction investors have a significant influence on the pace of development of disadvantaged regions.

Keywords: *Underdeveloped Village Development, Legal Aspects, Ministry of Foreign Affairs, multivariate analysis*